

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN
SYARIAH MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh

RAMADAN

NIM: 1604110066

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PRODI PERBANKAN SYARIAH

TAHUN AJARAN 2021 M / 1442 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH
MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH

NAMA : RAMADAN

NIM : 1604110066

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM : PERBANKAN SYARIAH
STUDI

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Mei 2021

Menyetujui

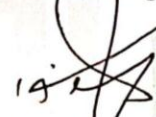
Pembimbing I



Jelita, M.SI

NIP. 198301242009122002

Pembimbing II



M. Noor Sayuti, M.E

NIP. 198704032018011002

Mengetahui

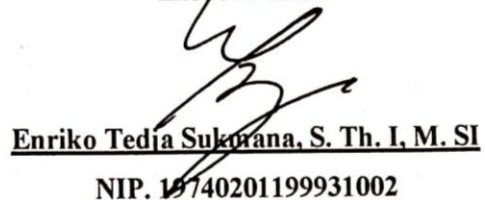
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S. H, M. Si.

NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S. Th. I, M. SI

NIP. 19740201199931002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. RAMADAN

Palangka Raya, Mei 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN PALANGKA RAYA
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : RAMADAN
NIM : 1604110066
Judul : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH
MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Jelita M. SI

NIP. 198301242009122002

Pembimbing II,



M. Noor Sayuti, M.E

NIP. 198704032018011002

PENGESAHAN




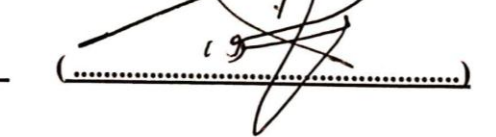
Skripsi yang berjudul **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH** oleh Ramadan NIM 1604110066 telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari: Jumat

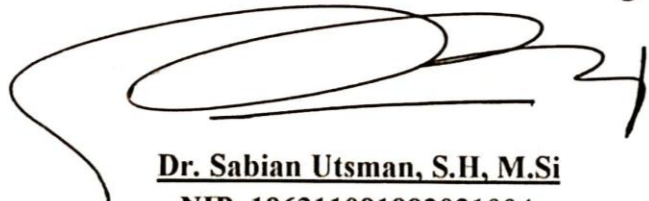
Tanggal: 21 Mei 2021

Palangka Raya, 21 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Enriko Tedja Sukmana, M.Si (.....) 
Ketua Sidang
2. Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si (.....) 
Penguji Utama/I
3. Jelita, M.Si (.....) 
Penguji II
4. M. Noor Sayuti, M.E (.....) 
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT
KALIMANTAN TENGAH**

ABSTRAK

Oleh: RAMADAN

NIM: 1604110066

Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, mendefinisikan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan dapat mengatur keuangan mereka sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Pada dasarnya literasi keuangan syariah sama saja dengan literasi keuangan pada umumnya namun disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah sehingga tidak menimbulkan kerugian baik pada satu pihak maupun pihak yang lain. OJK berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan sebab literasi keuangan tidak akan sampai pada masyarakat bila tidak ada suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga dalam menyosialisasikan tentang literasi keuangan tersebut. Oleh karenanya, OJK memiliki peran dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah meskipun ada kendala yang menyertainya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumenter. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kalimantan Tengah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2016-2019 OJK telah melakukan 56 kegiatan edukasi literasi keuangan tetapi sangat minim terkait keuangan syariah sehingga peneliti menyimpulkan bahwa peras OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah tidak maksimal. Cakupan wilayah, sumber daya manusia, minat masyarakat, serta keterlibatan pemerintah daerah menjadi alasan OJK dengan menganggap hal tersebut sebagai kendala dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah padahal banyak sekali solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kata Kunci: Peran, Literasi Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan

**THE ROLE OF OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) IN IMPROVING
THE SOCIETY OF CENTRAL KALIMANTAN SHARIA FINANCIAL
LITERATION**

ABSTRACT

By: RAMADAN
NIM: 1604110066

According to Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia guidebook published by the Otoritas Jasa Keuangan, defining financial literacy is a series of processes or activities to improve skills, knowledge, confidence that affect attitudes and behaviors for improve the quality of decision making and can manage their finances so that they are able to better manage their finances. Basically, Islamic financial literacy is the same as financial literacy in general, but it is adjusted to the provisions of sharia so that it does not cause harm to one party or the other. OJK is obliged to educate the public related to financial literacy because financial literacy will not reach the public if there is no effort made by the government or institutions to socialize financial literacy. Therefore, OJK has a role in increasing Islamic financial literacy for the people of Central Kalimantan despite the obstacles that accompany it.

This type of research is field research and data is obtained from observations, interviews and documentaries. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The research location was conducted at the OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Central Kalimantan office.

The results of this study indicate that since 2016-2019 the OJK has conducted 56 financial literacy education activities but very few related to Islamic finance, so the researchers concluded that squeezing the OJK in increasing Islamic financial literacy in Central Kalimantan is not optimal. Regional coverage, human resources, public interest, and local government involvement are the reasons for OJK to consider this an obstacle in increasing Islamic financial literacy for the people of Central Kalimantan, even though there are many solutions that can be done to overcome these obstacles.

Keywords: Role, Islamic Financial Literacy, Otoritas Jasa Keuangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alḥamdulillāhirobbil'alamiin. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat di Kalimantan Tengah”** dapat terselesaikan. Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai bantuan dari banyak pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar M.Ag selaku Rektor Institut Agama IslamNegeri Palangka Raya.
2. Yth. Dr. Sabian Utsman, S.H.M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi danBisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI selaku ketua jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya dan sekaligus dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan yang juga memberikan motivasi kepada peneliti.

4. Yth. Ibu Jelita, M,SI selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Noor Sayuti, M.E selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan ide, motivasi, kritik, arahan dan saran kepada peneliti serta memberikan motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan penelitian ini, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih karena telah sabar membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staf FEBI yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
6. Pihak OJK Kalteng yang telah membantu peneliti dengan bekerja sama dengan baik sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Semoga segala bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Di akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi banyak pihak. *Aamiin Yaa RobalAlamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, Mei 2021



Ramadan
NIM 1604110066

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadan
NIM : 1604110066
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH”, adalah benar karya saya sendiri.

Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Ramadan
NIM. 1604110066

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Rad ayat 11)

COMPLAIN BUT STILL DOING IS A PROFESSIONAL ATTITUDE IN
LIVING LIFE

**“Mengeluh Tapi Tetap Mengerjakan Adalah Sikap Profesional
Dalam Menjalani Hidup”**



PERSEMBAHAN

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan untuk saya yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik, adapun ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Nenek serta Saudara Saudari saya yang tak pernah lepas memberikan doa terbaik dan dukungan penuh untuk saya berkuliah hingga sampai pada titik ini.

Terima kasih teruntuk Civitas Akademika IAIN Palangka Raya yang telah memberikan pengalaman terbaik selama saya berkuliah di IAIN Palangka Raya, dengan dibimbing oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dosen-dosen terbaik lainnya yang paling saya banggakan.

Tidak lupa teman-teman seangkatan saya di IAIN Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya parodi Perbankan Syariah tahun angkatan 2016.

Orang-orang yang saya sayangi sahabat seperjuangan saya yang tidak akan kering di tengah gurun, tidak terbayar dengan berlian dan tidak lapuk dimakan usia yaitu: Andre, Dody, Amirullah, Arvi, Difa, Husien, Rival, Naufal, Wini, Eva, Mira, Desy, dan Tiara yang telah banyak memberikan motivasi dan kasih sayangnya yang tulus. Terima kasih juga untuk Serka Hendi, Kak Yuyu, Kak Erna, Kak Noni, dan Praka Ajo sekeluarga yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moril dan membantu selama masa sulit di perantauan.

Serta teman-teman organisasi HMJ Ekonomi Islam periode 2017/2018 dan DEMA FEBI periode 2018/2019 yang saya cintai.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teoritis	15
1. Teori Peran	15
2. Teori Kendala	17
3. Literasi Keuangan	19
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian	29

B.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
C.	Objek dan Subjek Penelitian.....	30
	1. Objek Penelitian	31
	2. Subjek Penelitian.....	31
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
	1. Observasi	31
	2. Wawancara	32
	3. Dokumentasi.....	33
E.	Pengabsahan Data	33
F.	Teknik Analisis Data	34
G.	Sistematika Penulisan	36
BAB IV PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA.....		38
A.	Gambaran Umum OJK Kalimantan Tengah.....	38
	1. Sejarah OJK Kalimantan Tengah	38
	2. Visi Misi OJK Kalteng	39
	3. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan	39
	4. Struktur Organisasi OJK Provinsi Kalimantan Tengah.....	42
B.	Pemaparan Data	43
C.	Analisis Data.....	51
	1. Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kalimantan Tengah.....	51
	2. Kendala OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kalimantan Tengah.....	56
BAB V PENUTUP.....		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan	14
--	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	28
Bagan 4.1 Struktur Organisasi OJK Kalteng	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan survei kedua yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2016, menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%.¹ Menurut OJK pula, Indonesia berada di urutan ketiga di dunia setelah India dan Cina dalam jumlah masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. Kondisi tersebut jelas kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sejalan dengan tingkat pemahaman keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan.²

Rendahnya tingkat literasi keuangan akan memberikan dampak yang buruk bagi perilaku keuangan masyarakat dalam mengelola keuangannya dimana masyarakat akan tidak mampu mempersiapkan masa depannya dengan baik, bergantung pada hutang dan menggunakan pihak ketiga yang tidak resmi dan tidak aman dalam melakukan transaksi keuangannya. Kondisi ini akan meningkatkan angka kemiskinan dan akan berdampak pada rendahnya angka pertumbuhan ekonomi.³

Penyebab kemiskinan adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi serta tidak meratanya pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat* dalam <http://www.ojk.go.id>, diakses tanggal: 15 Januari 2020.

² <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/03/15/o42ets383-indonesia-urutan-ketiga-dunia-yang-tidak-melek-keuangan>, *Indonesia Urutan Ketiga Dunia yang Tidak Melek Keuangan*, diakses tanggal 15 Maret 2020.

³ Delyana R. Pulungan, *Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan*, 2017, h. 60

diperlukan yaitu ekonomi yang bersifat inklusif, dalam arti merata dan berkualitas.⁴ Dalam hal ini keuangan inklusif merupakan salah satu instrumen yang menunjang literasi keuangan, yang mana OJK pada tahun 2013 telah menyusun strategi nasional literasi keuangan dan strategi nasional keuangan inklusif sebagai bentuk perhatian khusus terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang, OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya.⁵

Literasi keuangan memiliki peranan dalam meningkatkan pemahaman pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam literasi keuangan pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan

⁴ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta:Gramedia, 2014, h. 51.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017)* dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian yaitu, *well literate*, *sufficient literate*, *less literate*, *not literate*.⁶

Selain mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan, literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.⁷

OJK menambahkan ada dua hal utama yang perlu didorong yaitu perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Hal ini yang akan menjadikan industri jasa keuangan menjadi mitra masyarakat. Dalam mewujudkan itu semua, kerja sama yang erat antara Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah dan industri jasa keuangan sangatlah dibutuhkan, dimana literasi keuangan dapat berjalan dengan baik apabila didukung pula dengan program keuangan inklusif yang mana bila kedua program tersebut dijalankan dapat menghasilkan *usage/manfaat* yang baik. Inklusi keuangan sendiri bermakna sebagai sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, noneklusif yang dapat memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat.⁸

Dalam publikasinya OJK menampilkan secara jelas bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2016 adalah 29.7% yang

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi*, diakses tanggal : 15 Januari 2020.

⁷ Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 12.

⁸ Ibid,

artinya dari 100 penduduk hanya 30 orang saja yang mempunyai pengetahuan keuangan yang memadai. Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia lebih rendah yaitu hanya 8,1% yang artinya dari 100 penduduk tidak ada 9 orang yang memiliki pengetahuan memadai terkait keuangan syariah.⁹

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang dengan gencar juga menggalakkan berbagai sektor ekonomi syariah. Namun dengan populasi penduduk sekitar 2,2 juta jiwa¹⁰ dan sekitar 70% beragama Islam¹¹, tingkat literasi keuangan syariah di Kalimantan Tengah sangatlah rendah yaitu hanya 2,9%, peringkat ketujuh dari 34 Provinsi di Indonesia dengan tingkat literasi keuangan syariah terendah.¹² Peran pemerintah sangat diperlukan dalam peningkatan literasi keuangan syariah. Namun sayang sekali, instansi keuangan syariah di Kalimantan Tengah harus bergerak secara mandiri untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Daerah lain di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam sudah memiliki Bank Pembangunan Daerah yang berbasis syariah atau memiliki unit syariah seperti Bank Aceh, Bank Nusa Tenggara Barat, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Kalsel Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank DIY Syariah, dan bank lainnya. Sedangkan BPD Kalimantan Tengah yaitu Bank Kalteng masih berbasis konvensional dan tidak memiliki unit syariah.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017)* dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

¹⁰ <https://kalteng.bps.go.id/dynamictable/2017/04/21/196/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-provinsi-kalimantan-tengah-2000-2009.html>, diakses tanggal 15 Maret 2020.

¹¹ <https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01/592/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2016.html>, diakses tanggal 15 Maret 2020.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017)*, hal. 52, dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dalam Pasal 28 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, OJK berkewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya baik berbasis umum maupun syariah.¹³ Berangkat dari hal ini, peneliti melakukan penelitian tentang peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kaitannya dengan meningkatkan literasi keuangan. Untuk itu, peneliti mengambil judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat di Kalimantan Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah?
2. Apa kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

¹³ <https://jdih.setneg.go.id/>, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diakses tanggal 15 Maret 2020.

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui apa kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teori keuangan yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dan faktor penentu tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi terkait peran lembaga negara yang bersifat independen yaitu OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat umum. Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan bagi para pengambil keputusan atau lembaga keuangan syariah dan OJK. Dengan mengetahui tingkat literasi keuangan syariah diharapkan para pengambil keputusan atau lembaga

keuangan syariah dapat menentukan strategi guna meningkatkan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berbicara tentang objek penelitian yang bertema peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat yang dilakukan oleh OJK, sejauh yang peneliti telusuri sangat sedikit penelitian yang membahas hal tersebut. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, seperti:

Studi yang dilakukan oleh Amin Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto)”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Data diperoleh dari wawancara penelitian seperti kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan dalam pengumpulan data dengan observasi tidak langsung, wawancara tidak langsung, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Purwokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan

program strategi nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menggunakan 3 pilar dimana ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat yang *well literate*, adapun ketiga pilar tersebut adalah, yaitu: *pertama*, pilar edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, *kedua*, penguatan infrastruktur literasi keuangan, *ketiga*, pengembangan produk dan jasa keuangan.¹⁴

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah, melihat dan mengkaji bagaimana Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsinya dalam hal meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar berdampak positif yang besar bagi masyarakat untuk bias memaksimalkan penggunaan produk-produk lembaga keuangan sehingga lembaga keuangan juga tertuntut dalam hal memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penelitian Isnurhadi yang berjudul “Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang)”, menyatakan bahwa ada dua variabel yang dapat mempengaruhi literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, yaitu pengetahuan individu terhadap muamalah dalam Islam serta variabel upaya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Penelitian Isnurhadi ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan tiga variabel, yaitu pengetahuan individu terhadap *muamalah* dalam Islam, upaya promosi yang

¹⁴ Amin Hidayat, *Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto)*, Skripsi Sarjana, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017, h. 36-37 , t.d.

dilakukan oleh perbankan syariah dan faktor promosi yang dilakukan oleh pemerintah¹⁵.

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pengetahuan individu terhadap muamalah dalam Islam serta upaya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga OJK diharapkan melihat variabel ini dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan syariah.

Dalam penelitian skripsi oleh Adib Gusta yang berjudul “Analisis Deskriptif Tingkat Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap literasi keuangan di pasar Koga Bandar Lampung. Populasi atau sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang ada di daerah pasar koga Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Diskriptif. Hasil menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang ada di Pasar Koga Bandar Lampung tergolong pada kriteria *well literate*, tingkat gender dan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan. Kepemilikan akun yang dimiliki para pemilik UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung didominasi oleh produk perbankan.¹⁶

¹⁵ Isnurhadi, *Kajian tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah: Studi kasus masyarakat kota Palembang*, Laporan Hasil Penelitian, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013, h. 13.

¹⁶ Adib Gusta, *Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung*, Bandar Lampung, 2016, h. 10.

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu, tingkat gender dan pendidikan masyarakat berpengaruh besar terhadap tingkat literasi keuangan masyarakat sehingga hal ini juga perlu diperhatikan oleh OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Penelitian Agus Yulianto dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah dan kualitas terpersepsi terhadap keputusan dalam penggunaan produk atau layanan di lembaga keuangan syariah. Religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, agama dan status pernikahan sebagai variabel kontrol. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang di ambil melalui metode *purposive sampling*. Jumlah sampel penelitian sebanyak 272 responden. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi logistik biner dengan program SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung dan keputusan asuransi di lembaga keuangan syariah. Sedangkan literasi keuangan syariah berpengaruh negatif terhadap keputusan pembiayaan dan keputusan investasi di lembaga keuangan syariah. Sedangkan kualitas terpersepsi yang dimoderasi oleh religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan menabung dan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan masyarakat tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan yang dimilikinya, karena bisa jadi disebabkan oleh latar

belakang dan lingkungan sosial yang sangat berbeda sehingga pengendali keputusan-keputusan keuangannya tidaklah sepenuhnya tergantung pada literasi keuangan.¹⁷

Korelasi dengan penelitian ini adalah tingkat literasi keuangan syariah juga berpengaruh terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan syariah sehingga peningkatan literasi keuangan harus dioptimalkan agar penggunaan produk dan layanan jasa keuangan syariah juga optimal.

Penelitian Vira Erika berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU”. Rendahnya tingkat literasi keuangan dikalangan mahasiswa berdasarkan survei OJK menjelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa masih belum memahami konsep keuangan, padahal seharusnya mahasiswa bisa secara mandiri mengatur keuangannya dengan baik dan bertanggung jawab atas kepuasan keuangan yang mereka buat, karena bagi mereka mengelola keuangannya sendiri tanpa pengawasan orang tua. Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi keuangan mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU. Berdasarkan uji t diperoleh sebesar $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,745 > 1,98447$) (Sig $0.000 < \alpha 0.05$). dengan demikian H_0 ditolak. kesimpulannya : ada pengaruh

¹⁷ Agus Yulianto, *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah*, skripsi, Yogyakarta:2018.

signifikan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada Mahasiswa jurusan manajemen FEB UMSU. Berdasarkan nilai R square sebesar 0,125 menunjukkan variabel literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan sebesar $0,125 \times 100\% = 12,5\%$ dan sisanya sebesar $100\% - 12,5\% = 87,5\%$ dan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan variabel lain diluar ruang lingkup penelitian ini.¹⁸

Korelasi dengan penelitian ini adalah literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa sehingga peningkatan literasi keuangan perlu ditingkatkan agar mahasiswa serta masyarakat umum dapat mengelola keuangan dengan lebih baik.

¹⁸ Vira Erika, *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU*, skripsi, Medan: 2019.

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan pada penelitian maka dibuatlah dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Amin Hidayat, Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto), 2017, <i>field research</i>	Meneliti tentang peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan	Penelitian yang dilakukan Amin Hidayat ini terkait literasi keuangan secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada literasi keuangan syariah.
2.	Isnurhadi, Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang), 2013, <i>field research</i>	Meneliti tentang literasi keuangan syariah	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Isnurhadi adalah ingin mengetahui tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus terhadap peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah
3.	Adib Gusta, Analisis Deskriptif Tingkat Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung, 2016, <i>field research</i>	Meneliti tentang literasi keuangan	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Adib Gusta adalah mendeskripsikan tingkat literasi masyarakat di UMKM pasar Koga Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus terhadap peran OJK dalam

			meningkatkan literasi keuangan syariah
4.	Agus Yulianto, Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah, 2018	Meneliti tentang literasi keuangan	Penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.
5.	Vira Erika berjudul, Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU	Meneliti tentang literasi keuangan	Penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah

Sumber: diolah peneliti

B. Landasan Teoritis

1. Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁹ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang

¹⁹ Hasan Alwi, dkk.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005, h, 641

(lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.²⁰

Peranan adalah lakon yang dimainkan oleh seorang pemain. Maksud peran dalam hal ini adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri khas petugas dari kerjaan atau jabatan tertentu. Peranan artinya “Suatu bagian memegang pimpinan yang terutama (terjadinya suatu hal atau peristiwa)” misalnya tenaga ahli dan buruh yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu bergantung dengan yang lain, dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Unsur unsur peranan atau *role* adalah 1) Aspek dinamis dari kedudukan, 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban, 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan, 4) Bagian dari seseorang yang dimainkan.²¹

Dengan begitu peranan bisa dilakukan oleh siapapun sesuai dengan kedudukannya. Termasuk lembaga kemasyarakatan atau organisasi masyarakat yang telah ada di masyarakat dapat melakukan peranan sesuai fungsi dan tujuan berdirinya.

Poerwadarminta menyebutkan peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h, 243.

²¹ Cika Fauziah, Skripsi, *Peran Komunitas Save Street Children dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan di Malioboro Yogyakarta*, 2015, h. 19

individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.²²

Hamalik berpendapat bahwa peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri khas petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu.²³ Oleh sebab itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada suatu peristiwa.

2. Teori Kendala

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran²⁴. Secara istilah bisa dikatakan bahwa kendala adalah segala hal yang membatasi sistem, baik organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi.²⁵ Menurut Blocher kendala merupakan semua hal yang terjadi yang dapat menghambat kegiatan produksi sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Teori kendala merupakan teknik strategis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki CSF (*critical success*

²² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 1995, h. 751.

²³ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007, h. 33

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 686.

²⁵ Selviana Putri Larasati, Setya Haksama, *Penerapan Theory of Constraint Pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya*, Surabaya: Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 4 Nomor 2, 2016, h. 155

factor) atau elemen yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai misinya.²⁶

Berdasarkan asalnya, Hansen dan Mowen mengelompokkan kendala menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

- a. Kendala internal merupakan faktor yang terdapat di dalam organisasi yang dapat membatasi kinerja organisasi tersebut.
- b. Kendala eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar organisasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi.²⁷

Setiap instansi atau perusahaan akan menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas atas setiap produk. Keterbatasan-keterbatasan ini disebut sebagai kendala (*constraint*). Teori kendala mengakui kinerja setiap instansi ataupun perusahaan dibatasi oleh berbagai kendala. Hal ini menyebabkan teori kendala digunakan untuk mengembangkan pendekatan spesifik untuk mengelola kendala tersebut guna mendukung tujuan perbaikan yang berkelanjutan. Menurut teori kendala, jika hendak memperbaiki kinerja instansi atau perusahaan, mereka harus mengidentifikasi kendala-kendala, mengeksploitasi mereka dalam jangka pendek, serta menemukan cara untuk mengatasinya dalam jangka panjang.²⁸

Jadi kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala hal yang menghalangi atau menghambat kinerja OJK baik secara internal

²⁶ Edward J Blocher, *Manajemen Biaya Penekanan Strategis*, Terjemahan M. Y. Hamdan dan M. R. Adhi, Buku 2, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 189.

²⁷ Selviana Putri Larasati, Setya Haksama, *Penerapan Theory of..*, h. 157

²⁸ Budi Kurniawan, *Teori Kendala Sebagai Alat Pengukur Kinerja*, Jurnal Akuntansi Bisnis Vol. 9 No. 2, Universitas Bunda Mulia, h. 216

maupun eksternal dalam rangka peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah.

3. Literasi Keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi merupakan kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam hidupnya sehingga pengertian literasi mencakup kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.²⁹

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), literasi keuangan adalah kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan finansial individu³⁰. Sedangkan menurut pendapat ahli dalam penelitian Widyawati mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk mengubah pengetahuan itu secara tepat ke dalam perilaku.³¹

Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan,

²⁹ Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 3.

³⁰ Ibid, h. 7.

³¹ Irin Widayati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Jurnal Asset: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, 2012, h. 90-98.

mendefinisikan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan dapat mengatur keuangan mereka luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik³².

Jadi literasi keuangan merupakan pengetahuan dasar tentang konsep dan risiko keuangan yang akan mempengaruhi kebijakan pengambilan keputusan dalam hal keuangan baik keuangan pribadi maupun sosial.

Nina Ismiyani dalam tesisnya yang berjudul “Persepsi dan Minta Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Palangka Raya” menyimpulkan bahwa minat masyarakat pada bank syariah terbilang sedang. Hal ini pada umumnya disebabkan karena banyak yang belum memahami makna, arti dan kepentingannya dalam kehidupan di samping karena kurangnya informasi, sosialisasi dan edukasi dalam kehidupan masyarakat mengenai kebaikan dan hikmah dalam penerapan ekonomi dan keuangan syariah.³³

b. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Abdullah dan Razak menyatakan bahwa literasi keuangan syariah dalam aspek yang lebih luas terdiri dari manajemen

³² Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017)* dalam www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

³³ Nina Ismiyani, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Palangka Raya*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019. h.141.

keuangan atau kekayaan dasar (pendapatan, konsumsi dan tabungan), perencanaan keuangan, zakat, hukum waris dan wasiat, sumbangan amal (wakaf dan sedekah).³⁴ Definisi untuk literasi keuangan syariah merujuk pada literasi keuangan konvensional tetapi disesuaikan dengan sistem dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam keuangan Islam, dan istilah lainnya adalah “literasi halal” yaitu kemampuan untuk membedakan halal dan haram berdasarkan syariah³⁵. Mengemukakan pendapat yang sama bahwa literasi halal sebagai kemampuan seseorang dengan menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran dan keterampilan untuk membedakan antara halal dan haram pada produk dan layanan berdasarkan hukum syariah³⁶.

Pada dasarnya literasi keuangan syariah sama saja dengan literasi keuangan pada umumnya namun disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah sehingga tidak menimbulkan kerugian baik pada satu pihak maupun pihak yang lain.

Aspek–aspek literasi keuangan syariah yang digunakan sebagai dasar pengukuran literasi keuangan syariah dalam penelitian ini mengacu pada prinsip dasar keuangan Islam. Dalam literasi keuangan Islam semua aturan dan pengaturan utama bersumber

³⁴ Rose Abdullah dan Ahmad Lutfi Abdul Razak, *Exploratory Research Into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam*, 2015, h. 63-65.

³⁵ Imam Salehudin, *Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation*, SSRN Electronic Journal, 2010, h. 2.

³⁶ Purnomo M Antara, dkk, *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem*, *Procedia Economics and Finance*, 2016, h. 197.

pada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu sumber-sumber sekunder lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman yaitu dari *ijma'*, *qiyas* dan *ijtihad*. Pada dasarnya prinsip dasar keuangan Islam yaitu larangan adanya riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Selain hal tersebut, hal lain yang dilarang dalam keuangan syariah yaitu menggunakan dan menangani komoditas tertentu yang dilarang, berbagi keuntungan dan resiko dalam bisnis, zakat dan takaful dalam bisnis tersebut.³⁷

c. Tujuan Literasi Keuangan

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- 1) *Well literate* yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- 2) *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

³⁷ Agus Yulianto, *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: skripsi, 2018, h.15.

- 3) *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- 4) *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
- 2) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

- 1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;

- 2) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.³⁸

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.⁴⁰ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen.⁴¹

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang OJK tertulis bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen

³⁸ Ibid.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta :OJK, 2016, h. 2.

⁴⁰ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, Malang : Empat Dua, 2016, h. 41.

⁴¹ Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*, Cet I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, h. 157.

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Kemudian, disebutkan bahwa, Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintahan, dan tidak terpengaruh pemerintah (*independen*). Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian dalam masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK.⁴²

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.⁴³ Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah di bawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor

⁴² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2012, h. 221.

⁴³ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Alfabeta, 2014, h. 47.

perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.⁴⁴

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).⁴⁵

Tujuan lain dibentuknya OJK antara lain agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Di samping itu tujuan

⁴⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Cet I, Jakarta : Raja Grafindo Prasada, 2016, h. 296.

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku...* h. 2-3.

pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.⁴⁶ Inisiatif dalam rangka penguatan perlindungan konsumen juga perlu di dorong untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.⁴⁷

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal serta melaksanakan strategi nasional literasi keuangan Indonesia.⁴⁸ Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK (1) meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, (2) menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan, (3) meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan (4) melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.⁴⁹

⁴⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, h. 21.

⁴⁷ Nusron Wahid, *Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2014, h. 51-60.

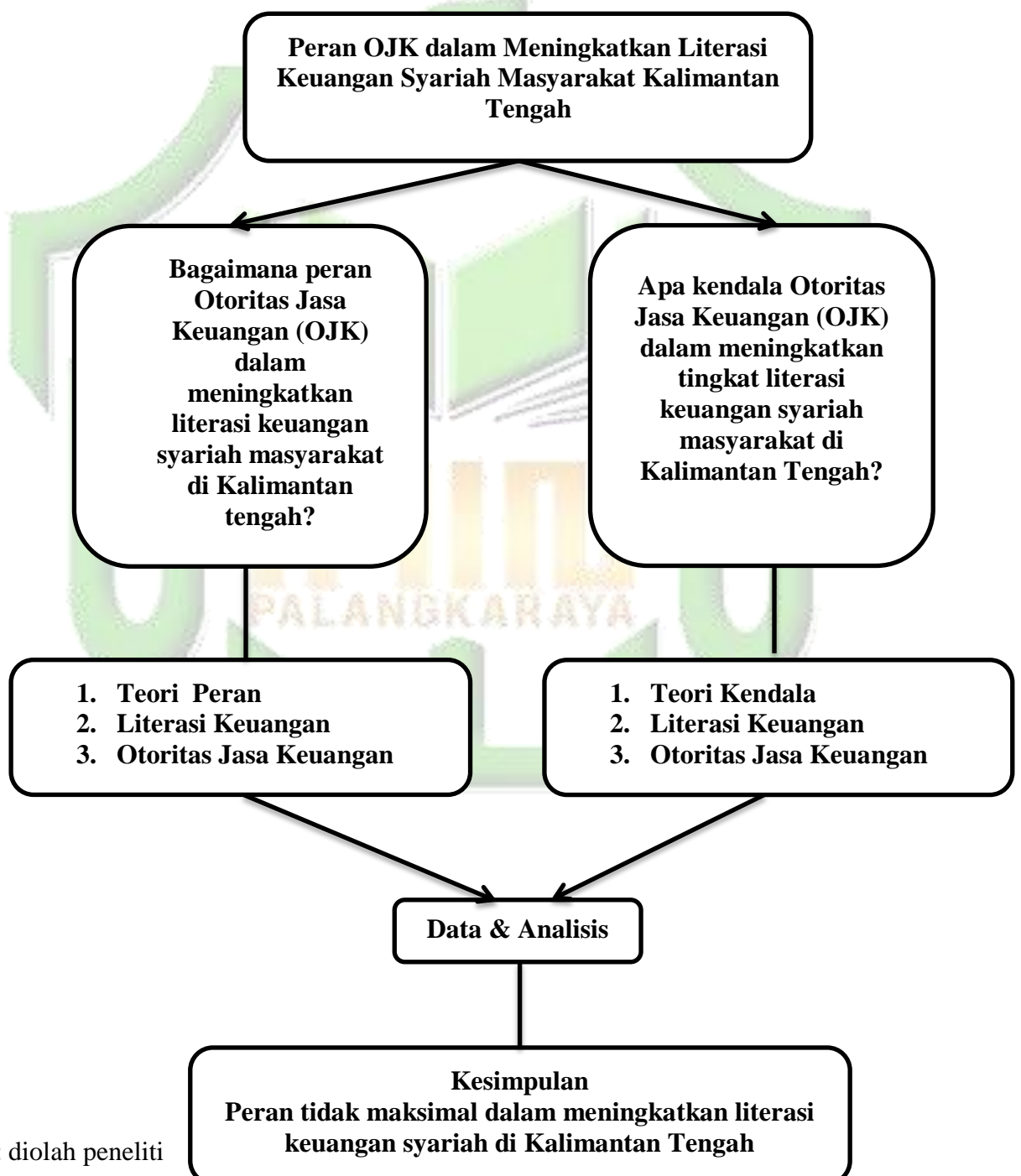
⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa sukses, 2014, h.42

C. Kerangka Pikir

Judul penelitian “Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat di Kalimantan Tengah” dapat dilihat sebagai gambaran sebagaimana kerangka pikir berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: diolah peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode kualitatif, dimana penelitian ini akan dilakukan dengan cara menulis, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.⁵⁰

Metode Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁵¹ Sedangkan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi buku, teks, artikel, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Peneliti Laporan Skripsi, Tesis dan Disertasi jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, h. 10.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h., 8.

⁵² Sudarwan Daim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h., 51.

masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tandan, atau gambaran tertentu.⁵³ Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.⁵⁴ Penelitian ini diawali dengan observasi peneliti ke kantor OJK Kalimantan Tengah, yaitu melihat berbagai program peningkatan literasi keuangan. Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada bagaimana peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan mulai Agustus 2020 sampai April 2021. Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kalimantan Tengah dengan alamat kantor: jalan RTA Milono Nomor 7, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, subjek peneliti merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data akan diteliti dan diamati oleh peneliti.⁵⁵

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research...*, h. 12.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 14

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rienka Cipta, 1992, h. 119.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini yaitu Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.⁵⁶ Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah salah satu karyawan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kalimantan Tengah bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan beberapa informan yang pernah mengikuti kegiatan edukasi literasi keuangan dari OJK.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

1. Observasi

Metode Observasi adalah merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik

⁵⁶ Zaenal Abidin, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Edisi Revisi, Purwokerto: STAIN Perss, 2014, h. 88.

terhadap pengukuran tersebut.⁵⁷ pengukuran tersebut dilakukan dengan observasi secara tidak langsung.

Sebagai bentuk observasi awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan datang langsung ke kantor OJK Kalimantan Tengah untuk mengetahui program edukasi yang dilakukan oleh OJK kepada masyarakat. Bentuk observasi lain yang akan dilakukan oleh peneliti apabila memungkinkan yaitu dengan ikut hadir dalam kegiatan edukasi yang dilakukan oleh OJK Kalimantan Tengah. Data yang diperoleh melalui teknik observasi adalah data-data yang diperlukan terkait dengan usaha OJK dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

Dalam hal ini untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah peneliti akan meminta keterangan kepada subjek dan beberapa informan penelitian, kemudian para subjek dan informan tersebut dapat memberikan keterangan dan jawaban dengan jelas dan baik.

⁵⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, h. 30.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, dengan menetapkan pertanyaan secara terbuka dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu, buku, dokumen pemerintah atau swasta, data tersimpan di *website*, dan lain-lain. data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.⁵⁸

Metode pengumpulan data dengan penelusuran dokumen-dokumen yang ada dan hasil pemaparan dari surat balasan OJK mengenai literasi keuangan adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian ini, karena data-data yang diperoleh nantinya lebih lengkap dan akurat dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan-informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian.

E. Pengabsahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan

⁵⁸ Ibid.

menggunakan metode triangulasi sumber. Metode triangulasi menurut Moleong merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain di luar dari data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data.

Peneliti akan membandingkan hasil data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila terjadi pertentangan antara satu data dengan data lain, maka data tersebut akan ditinjau ulang berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan beserta data-data lain yang mendukung untuk dibandingkan kembali.

F. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan upaya mencari tata hubungan secara sistematis antara kajian buku, analisis isi artikel, catatan hasil lapangan, dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dalam model interaktif, analisis data memungkinkan dilakukan pada waktu peneliti berada di tempat penelitian dengan mengenali subjek secara lebih cermat.

Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis domain yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Hasil analisis ini masih

berupa pengetahuan tingkat permukaan tentang berbagai ranah konseptual.⁵⁹

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan untuk dilakukan, berikut tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yaitu:⁶⁰

1. *Data collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. *Data reduction* adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
3. *Data display* atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangan. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. *Data conclusions* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh.

⁵⁹ V. Wiratana Sujarweni, *Metodologi Penelitian, Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h., 33.

⁶⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69-70.

Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar sesuai dengan keadaan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diurutkan menjadi beberapa bab, antara lain:

BAB I yaitu peneliti menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

BAB II yaitu tinjauan Pustaka yang membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teori dari penelitian peneliti. Dalam bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, landasan teoritis dan kerangka pikir. Berikut dasar-dasar teoritik yang dijadikan acuan, yaitu: pengertian literasi keuangan, konsep literasi keuangan syariah, tujuan literasi keuangan, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

BAB III peneliti membahas tentang Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang rancangan atau rencana penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang termasuk ke dalam bagian ini yaitu, waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode mengolah dan analisis data, serta keabsahan data dan sistematika penulisan.

BAB IV terdiri dari gambaran umum OJK Kalimantan Tengah yang terdiri dari sejarah, Visi Misi, tujuan, dan struktur organisasi OJK Kalteng.

Pada bab ini juga terdapat pemaparan data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh serta hasil dari pada analisis data tersebut berdasarkan teori pada landasan teoritis.

BAB V terdiri dari uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari penulis terkait penelitian yang dilakukan.



BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum OJK Kalimantan Tengah

1. Sejarah OJK Kalimantan Tengah

Kantor OJK Provinsi Kalteng adalah salah satu dari 35 kantor OJK yang tersebar di wilayah NKRI dan didirikan sejak 31 Desember 2013. KOJK ini sebelumnya menempati Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 11 Palangkaraya. KOJK Kalteng merupakan kantor baru OJK ke-6 di daerah yang mulai diresmikan pada tahun 2015. Sebelumnya, sudah diresmikan gedung kantor baru di KOJK Ambon, KOJK Kupang, KOJK Yogyakarta, KOJK Purwokerto, dan KOJK Tegal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad meresmikan kantor yang berlokasi di Jalan G. Obos nomor 35 Palangka Raya bersama Gubernur Kalimantan Tengah A. Neras Narang pada tanggal 25 Mei 2015 yang juga dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono, pimpinan BI Kalteng, serta pimpinan industri jasa keuangan di Palangkaraya.⁶¹

Selanjutnya kantor OJK Kalimantan Tengah berpindah kantor ke jalan RTA Milono nomor 7 Palangka Raya sejak tanggal 6 Juli 2020.

⁶¹ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Resmikan-Kantor-Baru-di-Palangkaraya.aspx>, diakses pada 09 Juni 2020.

2. Visi Misi OJK Kalteng

Agar tercapainya tujuan yang diharapkan, OJK memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang tepercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶²

3. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; (b) serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) Dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan,

⁶² <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses pada 09 Juni 2020.

pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.⁶³

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut.⁶⁴

a. Asas independensi

Yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas kepastian hukum

Yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

c. Asas kepentingan umum

Yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

⁶³ TIM Kerja Sama Pantia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum: Kajian Akademik* h.29.

⁶⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa sukses, 2014), h.113.

d. Asas keterbukaan

Yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

e. Asas profesionalitas

Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

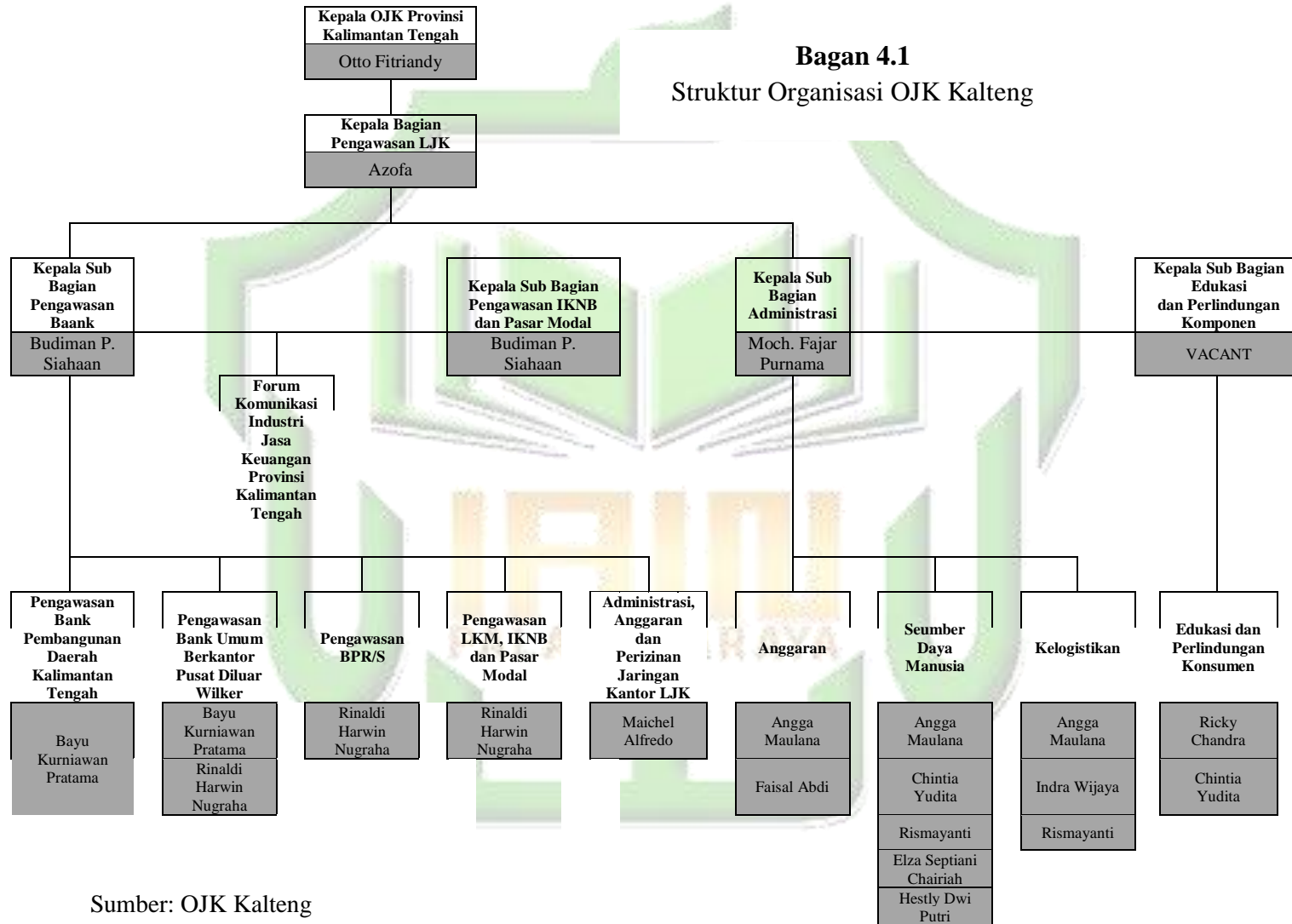
f. Asas integritas

Yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

g. Asas akuntabilitas

Yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

4. Struktur Organisasi OJK Provinsi Kalimantan Tengah



B. Pemaparan Data

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak OJK Kalteng dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan OJK dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Tengah sejak tahun 2016?

“Banyak banget mas dari 2016, kalau berdasarkan data yang saya pegang ini ada sekitar 56 kegiatan edukasi yang sudah OJK lakukan ke masyarakat, baik ke pelajar, mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga, pensiunan, PNS, LJK, TNI, juga masyarakat umum, Mas. Masyarakat juga bisa datang langsung ke OJK untuk konsultasi atau ada keperluan lain, gratis mas. Media massa dan elektronik juga coba kami maksimalkan mas.”⁶⁵

2. Apakah OJK bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Tengah?

“Jelas mas, jadi dalam kegiatan edukasi ini kita juga bekerja sama dengan berbagai lembaga jasa keuangan, sebagai contohnya misalkan kita edukasi kepada pelaku usaha kita bekerja sama terhadap asosiasi maupun kepada dinas koperasi baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Kita juga bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi pelaku usaha, kemudian juga misalkan kita juga edukasi kepada mahasiswa yang pasti kita bekerja sama dengan pihak kampus. Selain itu juga setiap ada kegiatan itu juga pasti kami akan mengundang salah satu lembaga keuangan untuk menjadi narasumbernya misalkan kami edukasi kepada mahasiswa misalnya berarti untuk penjelasan waspada investasi dari kami nanti pasti untuk penjelasan industrinya misalkan kami fokus kepada pasar modal kami akan ajak juga dari bursa efek Indonesia, atau misalkan kami lagi fokus kepada pembiayaan nanti kami ajak dari asosiasi perusahaan pembiayaan seperti itu. Jadi pasti bekerja sama dengan pihak lain, tidak mungkin kita bergerak sendiri.”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kalteng pada tanggal 12 Oktober 2020.

⁶⁶ Ibid.

3. Siapa sasaran utama OJK dalam meningkatkan literasi keuangan?

“Ini sebenarnya siapa pun mas, dari mulai masyarakat umum, mahasiswa, kemudian juga ibu rumah tangga, kemudian juga pelaku usaha, kelompok pelajar, tetapi memang pada setiap tahunnya itu ada seperti target utama ya mas ya seingat saya yang tahun ini itu target utamanya adalah pelaku usaha dan UMK mas. Jadi untuk target secara umum itu seluruhnya mas, seluruh lapisan masyarakat, termasuk ASN, pemuda, mahasiswa, pekerja, bahkan pelaku usaha sampai misalnya ke ibu rumah tangga pun kami juga bertanggung jawab untuk melakukan edukasi. Karena kan semua lapisan masyarakat pada intinya memerlukan produk keuangan mas, jadi ibaratnya kami ingin menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat termasuk juga kami melakukan sosialisasi ke anak SD, kita juga melakukan sosialisasi dan cerdas cermat tingkat SD mas. OJK juga sudah membuat beberapa buku mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dengan tingkat perguruan tinggi itu ada buku seri literasinya mas. Nanti mas bisa cek di sikapiuangku.go.id. dengan itu aja berarti menandakan dari semua lini itu berusaha dijangkau oleh OJK.”⁶⁷

4. Adakah program khusus yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah?

“Kalau program khusus literasi keuangan syariah ini sebenarnya kita tidak menjadwalkan secara khusus syariah, tapi pasti dalam setiap tahunnya pasti ada mas. Sebagai contohnya bulan Oktober ini kita juga bekerja sama dengan IAIN itu ada seminar syariah fest gitu. Kemudian juga kita ada kerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah waktu itu terkait dengan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS, macam-macam mas. Tapi memang tidak sebanyak yang konvensional. Tapi pada setiap kegiatan yang konvensional pun pasti akan kita sampaikan apa itu lembaga keuangan syariah, tapi untuk yang mendalaminya pasti kita bekerja sama dengan pihak lain lah untuk menyampaikan materinya.”⁶⁸

5. Apakah OJK sudah memetakan tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Tengah?

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

“Ada mas, namanya survei nasional literasi dan inklusi keuangan itu sudah terbaru tahun 2019 mas. Untuk provinsi Kalimantan Tengah itu di 37,01 mas, nasionalnya berada pada 38,23. Memang kita masih dibawah nasional mas untuk tingkat literasinya. Untuk data literasi keuangan syariahnya belum ada mas.”⁶⁹

6. Berada di level manakah tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah?

Menjawab Pertanyaan ini, OJK mengatakan bahwa mereka tidak memiliki data terkait tingkat literasi keuangan syariah di Kalimantan Tengah sehingga mereka tidak bisa memastikan berada di level mana tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah.⁷⁰

7. Apa kendala yang dihadapi OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah?

“Yang pertama gini mas, tentu aja cakupan wilayah mas yang pertama. Wilayah Kalteng ini sangat luas, yang pertama itu. Tentunya kalau hanya bersandarkan OJK aja itu pasti akan sangat sulit, makanya tadi kami juga pasti akan menggandeng instansi lain dengan harapan apa, jadi nanti yang sudah kita edukasi itu memiliki yang namanya *multiplier effect* mas, jadi dia menginformasikan ke orang lain menginformasikan ke orang lain lagi, seperti itu. Jadi yang pertama cakupan wilayah. Sampai ke kecamatan-kecamatan itu jujur saja kalau sampai ke kecamatan kami belum menjangkau, tapi kalau misalkan ke kabupaten kota kemudian sampai kecamatan terdekat di kota tersebut kami sudah, karena kan kecamatan ada banyak sekali. Edukasinya seperti apa, kita pernah juga panggil juga edukasi kepada BUMDESnya, terus juga kita panggil seluruh BUMDES di kabupaten kita panggil kita edukasi juga mas. Yang pertama itu. Yang kedua juga kesulitannya adalah kesadaran masyarakat atau keinginan masyarakat mas, jadi ini untuk jujur saja di Kalteng ini berita lembaga jasa keuangan atau apa itu produk jasa keuangan itu masih dirasa kurang seksi lah. Untuk masyarakat di sini masih lebih ke arah hasil bumi

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

kemudian yang macam-macamlah tapi menurut dia itu tentang lembaga keuangan itu masih hal yang dalam tanda kutip tidak penting. Kita ini ingin *mengendors* mereka agar lebih paham agak sedikit kesulitan. Jadi memang belum ada apa ya keinginan yang cukup kuat dari masyarakat. Kita juga dorong lembaga keuangan ayo silakan coba kalian juga lakukan edukasi karena mereka juga wajib memberikan edukasi lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga juga mungkin kesulitannya itu dalam hal edukasi tentunya SDM ya mas ya, bukan SDM hanya dari kami, dari SDM dari masyarakatnya juga tadi sudah saya jelaskan mas. Ini juga mas, keterlibatan dari pemerintah daerah mas, itu yang sangat kami harapkan sebenarnya dalam kegiatan ini, tapi memang kita juga telah memiliki tim percepatan akses keuangan daerah, nah dalam itu saja memang belum ada ibaratnya penganggaran khusus untuk kegiatan khusus dari pemerintah daerah untuk melakukan edukasi-edukasi seperti keuangan. Ya kurang lebih begitu mas kalau hambatannya belum ada hambatan yang memang benar-benar kami mentok dan tidak bisa dilakukan.”⁷¹

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh, bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut antara lain berupa:

1. Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan, Waspada Investasi, dan Lembaga Keuangan Mikro yang dilaksanakan di kota Sampit pada tanggal 04 Februari 2016
2. Sosialisasi dan Edukasi Produk Keuangan dan Sinergi LJK dengan UMKM yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya pada tanggal 06 Desember 2016
3. Sosialisasi dan Edukasi OJK, LJK, dan Himbauan Waspada Investasi kepada Murid dan Guru SMA, MA, dan SMP di Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 27 April 2017

⁷¹ Ibid.

4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Siswa dan Guru SMA di Kabupaten Gunung Mas, Buntok, Tamiang Layang, Barito Utara, dan Puruk Cahu pada tahun 2018
5. Sosialisasi dan Edukasi OJK, Lembaga Jasa Keuangan dan Waspada Investasi Kepada Pelajar, Guru dan Masyarakat di Desa Luwuk Bunter pada tanggal 24 Januari 2019
6. Sosialisasi dan Edukasi OJK, Lembaga Jasa Keuangan, Waspada dan Cerdas Investasi Kepada Mahasiswa dan Dosen di Universitas Antakusuma di Pangkalan Bun pada tanggal 19 November 2019
7. OJK Mengajar, di aula utama IAIN Palangka Raya pada tanggal 28 Maret 2019, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi lainnya.

Selain itu, OJK Kalteng juga melaksanakan berbagai lomba sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat seperti Lomba Cerdas Cermat Siswa Tingkat SMP dan Sederajat se-Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya pada tanggal 7-8 September 2017, Lomba Cerdas Cermat Siswa Tingkat SD dan Sederajat se-Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya pada tanggal 24 November 2017, dan Gelar Karya Kalteng pada tanggal 8-12 Maret 2018.⁷²

Metode edukasi dan sosialisasi juga dilakukan secara tidak langsung seperti melalui berbagai media baik media cetak maupun elektronik. Media elektronik menggunakan stasiun televisi lokal seperti Dialog Interaktif Waspada Investasi di TVRI Kalteng pada tanggal 17 Maret 2016

⁷² Data dokumentasi dari OJK Kalteng

Kegiatan yang di lakukan oleh OJK Kalteng juga termuat di koran ataupun media elektronik lainnya. Salah satu berita yang termuat di laman berita Prokal Sampit dengan judul OJK Siap Dampingi Desa Kembangkan LKM, pada tanggal 2 November 2018⁷³.

Untuk mengonfirmasi kebenaran dari informasi yang peneliti peroleh dari OJK di atas, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Informan I

Berdasarkan wawancara dengan informan I, informan I membenarkan bahwa dia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi OJK pada tanggal 25 Juli 2019 di aula Kemenag Sampit. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh guru dan siswa dari berbagai sekolah di kota Sampit. Selanjutnya informan I mengatakan bahwa materi tentang ekonomi syariah ada disampaikan, khususnya tentang perbankan syariah. Tetapi materi secara umum tentang pengenalan OJK dan waspada investasi. Informan I mengatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan tersebut beliau menjadi lebih sadar akan pentingnya investasi.⁷⁴

2. Informan II

Berdasarkan wawancara dengan informan II, informan II juga membenarkan bahwa dia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi OJK pada tanggal 25 Juli 2019 di aula Kemenag Sampit.

⁷³ <https://sampit.prokal.co/read/news/19641-ojk-siap-dampingi-desa-kembangkan-lkm>

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Sutini (34 tahun, guru, perempuan) pada tanggal 27 November 2020.

Informan II juga melanjutkan bahwa materi yang disampaikan tentang perbankan dan waspada investasi. Untuk materi ekonomi syariah dijelaskan tentang perbankan syariah. Informan II mengatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan tersebut dia jadi lebih mengenal metode investasi.⁷⁵

3. Informan III

Berdasarkan wawancara dengan informan III, informan III juga membenarkan bahwa dia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi OJK pada tanggal 27 Maret 2019 di aula STIKES Eka Harap Palangka Raya. Informan III juga mengatakan bahwa materi dalam kegiatan ini lebih fokus kepada pengenalan OJK tetapi juga ada disinggung tentang perbankan syariah. Informan III juga mengatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan tersebut ia menjadi lebih tahu tentang fungsi dan peranan OJK.⁷⁶

4. Informan IV

Berdasarkan wawancara dengan informan IV, informan IV juga membenarkan bahwa dia pernah mengikuti kegiatan Seminar Nasional Pasar Modal pada tanggal 04 Mei 2019 di aula Cristian Center Palangka Raya. Materi yang disampaikan lebih fokus pada pasar modal dan investasi tetapi juga ada disinggung juga tentang saham

⁷⁵ Wawancara dengan Yusuf Ardiansyah (16 tahun, pelajar, laki-laki) pada tanggal 26 November 2020.

⁷⁶ Wawancara dengan Kartika Dwi Adriani (19 tahun, mahasiswa, perempuan) pada tanggal 3 Desember 2020.

syariah. Informan IV juga mengatakan setelah mengikuti kegiatan tersebut dia menjadi lebih mengerti tentang dunia pasar modal.⁷⁷

5. Informan V

Berdasarkan wawancara dengan informan V, informan V membenarkan bahwa OJK pernah melaksanakan kegiatan Seminar Nasional OJK Mengajar pada tanggal 28 Maret 2019 di aula IAIN Palangka Raya. Informan V yang merupakan mahasiswa dari fakultas FEBI juga mengikuti kegiatan tersebut sebagai peserta. Lebih lanjut informan V mengatakan bahwa materi tentang ekonomi syariah sangat minim. Materi yang disampaikan lebih fokus pada pengenalan OJK dan waspada investasi. Setelah mengikuti kegiatan tersebut informan V lebih mengenal OJK dan metode investasi.⁷⁸

6. Informan VI

Peneliti menanyakan kepada informan VI saat melakukan wawancara⁷⁹: apakah benar BNI Syariah pernah mengadakan kegiatan seminar Direksi Mengajar pada tanggal 20 November 2019 di SMA Muhammadiyah 1 Palangka Raya? Informan menjawab bahwa mereka (BNI Syariah) benar pernah mengadakan kegiatan ini sebagai bentuk upaya mereka untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah.

⁷⁷ Wawancara dengan Tiara Septa Ayu (22 tahun, mahasiswa, perempuan) pada tanggal 2 Desember 2020.

⁷⁸ Wawancara dengan Difa Rahmadhan (22 tahun, mahasiswa, laki-laki) pada tanggal 2 Desember 2020.

⁷⁹ Wawancara dengan Khabib (25 tahun, pegawai bank, laki-laki) pada tanggal 3 Desember 2020.

Peneliti melanjutkan pertanyaan: materi apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, apakah ada materi tentang ekonomi atau keuangan syariah? Informan VI menjawab:

“ya jelas tentang perbankan syariah dong mas. Kita berusaha untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang apa itu bank syariah, apa saja produk yang ditawarkan bank syariah serta keunggulan yang dimiliki dengan harapan literasi syariah meningkat dan masyarakat banyak menggunakan produk-produk syariah”

Hasil dari penelusuran penulis mengenai publikasi kegiatan Direksi Mengajar ini juga penulis temukan di laman berita PRESSRELEASE.ID dengan judul “Tingkatkan Literasi Keuangan Pelajar, BNI Syariah Gelar Direksi Mengajar di Palangka Raya”.⁸⁰

C. Analisis Data

Analisis hasil penelitian ini melihat dari paparan data yang peneliti peroleh terkait peran dan kendala OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah.

1. Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kalimantan Tengah

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak OJK Kalteng. Hasil dari wawancara tersebut peneliti dapatkan bahwa OJK Kalteng sudah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

⁸⁰ <https://pressrelease.kontan.co.id/release/tingkatkan-literasi-keuangan-pelajar-bni-syariah-gelar-direksi-mengajar-di-palangka-raja?page=all>, diakses tanggal 27 Desember 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dan seluruh data yang berhasil dihimpun, dapat dilakukan analisis menggunakan semua landasan teori dan landasan pustaka, analisa pada rumusan masalah pertama mengenai peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah.

Peran, sebagaimana yang dipaparkan pada landasan teoritis merupakan tuntutan yang melekat pada seseorang/lembaga untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, maka OJK juga berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya baik berbasis umum maupun syariah sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tentang OJK.

Sosialisasi dan edukasi literasi keuangan gencar dilakukan oleh OJK Kalteng. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai literasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan sendiri maupun kelompok. Sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh OJK Kalteng sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan khususnya meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi literasi keuangan harus direncanakan secara sistematis dengan memaksimalkan sumber daya dan media yang ada supaya tujuan bisa tercapai dengan baik.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti membagi metode edukasi yang dilakukan OJK menjadi dua, yaitu:

a. *Direct Method*

Terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, OJK Kalteng telah melaksanakan 56 kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang di antaranya ditujukan kepada pelajar dan mahasiswa, dosen, ibu rumah tangga, ibu-ibu koperasi, pensiunan, PNS, lembaga jasa keuangan, TNI, serta masyarakat umum.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara langsung bisa dilakukan melalui 2 sistem yaitu, Pertama, sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh karyawan OJK kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan. Kedua, masyarakat yang berkonsultasi secara langsung datang ke kantor OJK Kalteng.

Untuk mengonfirmasi kebenaran dari data tersebut peneliti sudah mewawancarai lima orang informan yang terdiri dari guru, siswa, dan mahasiswa yang menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi dari OJK kepada masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut semua informan mengatakan benar bahwa OJK pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada mereka. Namun kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut sangat minim informasi tentang keuangan syariah. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan OJK lebih fokus kepada pengenalan OJK dan waspada investasi.

Melihat banyaknya umat Islam di Kalimantan Tengah serta pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang mulai masif, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat seharusnya menjadi salah satu program prioritas yang dilakukan OJK. Karena untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah, literasi keuangan syariah masyarakat juga harus ditingkatkan agar masyarakat bisa memaksimalkan dalam menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan lembaga jasa keuangan.

b. *Undirect Method*

Dari informasi yang peneliti peroleh, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 OJK hanya pernah satu kali saja melakukan dialog dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat di stasiun televisi yakni pada tahun 2016 silam. OJK juga tidak memiliki situs *website* resmi untuk kantor OJK di tiap provinsi. Adapun akun media sosial *Facebook* resmi OJK Kalteng sudah tidak terbaru lagi dengan postingan terakhir tanggal 18 Mei 2016.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi, OJK seharusnya memaksimalkan sarana media sosial yang ada untuk dapat berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat. OJK dapat membuat konten edukasi melalui media sosial tersebut karena masyarakat sekarang sudah tidak lepas dan tidak jauh dari media sosial. Paling tidak OJK mampu menggandeng konten kreator dari berbagai media

sosial untuk menyosialisasikan berbagai program atau menitipkan pesan edukasi pada konten kreator tersebut.

Meskipun OJK tidak memiliki program khusus dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, OJK tetap mendukung dan mengapresiasi berbagai lembaga seperti lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, kelompok organisasi, MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), dan lembaga maupun organisasi lainnya dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah.

Seminar Nasional Ekonomi Syariah yang diselenggarakan pada 29 April 2019 di Aula Bappedalitbang Palangka Raya merupakan bentuk kerja sama antara pengurus MES Kalteng, Bank Indonesia, OJK, dan Bank Kalteng dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah. Seminar nasional ini merupakan satu dari empat rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah. Tiga rangkaian kegiatan lainnya yaitu pelatihan koperasi dan UKM Syariah, Pemilihan tokoh ekonomi syariah, dan pameran produk-produk syariah.

“Direksi Mengajar” yang diselenggarakan pada 20 November 2019 oleh BNI Syariah juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi literasi dan inklusi keuangan syariah yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi Mengajar mengacu pada POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat Bab II Pasal 2, di mana Pelaku Usaha Jasa Keuangan

(PUJK) wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

2. Kendala OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan, maka kendala internal dan eksternal yang dihadapi OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan dan ekspansi bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang semakin masif membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten. Namun kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten tersebut tidak seimbang dengan sumber daya manusia yang tersedia. Maka dari itu OJK menggandeng instansi lain dalam rangka kerja sama dalam meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah di Kalimantan Tengah sangat diperlukan tersedianya sumber daya insani yang handal bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Tengah. OJK menganggap *supply* sumber daya manusia yang handal, kompeten dan profesional dalam gerakan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Tengah masih kurang. Namun peneliti

tidak melihat ini sebagai kendala mengingat mayoritas penduduk Kalimantan Tengah beragama Islam, sehingga OJK harus mampu mengoptimalkan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan literasi keuangan syariah seperti kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan IAIN Palangka Raya mengingat IAIN Palangka Raya merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal yang memuat edukasi ekonomi syariah di Kalimantan Tengah.

2. Cakupan Wilayah

Kalimantan tengah merupakan provinsi yang sangat luas dengan luas wilayah 153.564 km³ dengan jumlah penduduk sekitar 2,2 juta jiwa dengan wilayah administrasi yang terbagi dalam 13 kabupaten dan 1 kota. Karena kantor OJK hanya ada satu di tiap provinsi sedangkan wilayah Kalimantan Tengah sangat luas, sehingga bisa dipahami bahwa cakupan wilayah yang luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam merupakan kendala yang dihadapi OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Tengah.

Namun seperti yang diketahui, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi, peluang dan kesempatan dalam mengembangkan ekonomi syariah khususnya pada industri keuangan. Penduduk Kalimantan Tengah berjumlah 72,3% beragama Islam (mayoritas). Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi OJK untuk lebih mengedepankan edukasi terkait literasi

keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah. Ditambah lagi dengan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi sekarang harusnya juga bisa memudahkan OJK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat meskipun dengan cakupan wilayah yang luas.

3. Minat Masyarakat

Menurut OJK, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya di Kalimantan Tengah masih dirasakan akan kurangnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah dalam kehidupannya. Hal ini pada umumnya disebabkan karena banyak yang belum memahami makna, arti dan kepentingannya dalam kehidupan di samping karena kurangnya informasi, sosialisasi dan edukasi dalam kehidupan masyarakat mengenai kebaikan dan hikmah dalam penerapan ekonomi dan keuangan syariah. Hal inilah yang menjadi salah kendala yang dihadapi OJK dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat provinsi Kalimantan Tengah. Namun peneliti tidak melihat ini sebagai kendala karena minat adalah objek yang menjadi sasaran OJK yang mana OJK harus mampu menciptakan ruang edukasi yang menarik sehingga bisa memancing minat masyarakat untuk lebih mengetahui terkait keuangan syariah.

4. Keterlibatan Pemerintah Daerah

Menurut OJK, pemerintah daerah sangat minim dalam hal keterlibatan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Kalimantan Tengah. Peran pemerintah daerah juga sangat penting

dalam peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Sampai sekarang masih belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan ketentuan, pedoman dan petunjuk dalam rangka gerakan, peningkatan dan pengembangan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah, instansi keuangan syariah di Kalimantan Tengah harus bergerak secara mandiri untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Daerah lain di Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam sudah memiliki Bank Pembangunan Daerah yang berbasis syariah atau memiliki unit syariah seperti Bank Aceh, Bank Nusa Tenggara Barat, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Kalsel Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank DIY Syariah, dan bank lainnya. Sedangkan BPD Kalimantan Tengah yaitu Bank Kalteng masih berbasis konvensional dan tidak memiliki unit syariah.

Kendati demikian, OJK tidak semestinya melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah karena sudah menjadi tugas OJK untuk mengedukasi masyarakat terkait keuangan umum maupun syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, sehingga peneliti tidak melihat hal ini sebagai kendala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. OJK Kalimantan Tengah sudah berupaya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Tengah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai metode yang dilakukan OJK dalam meningkatkan literasi keuangan baik *direct* maupun *undirect method* yang terhitung sejak tahun 2016-2019 sebanyak 56 kegiatan seperti melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, melalui media masa, edukasi melalui berbagai perlombaan, keterbukaan untuk konsultasi langsung ke OJK, dan membangun relasi untuk bekerja sama dengan instansi lain. Namun edukasi keuangan syariah yang dilakukan OJK sangat minim. Bisa dilihat dari tidak adanya program khusus yang dilakukan OJK dalam rangka edukasi literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah, para informan juga menyampaikan bahwa materi keuangan syariah yang disampaikan dalam kegiatan edukasi OJK juga sangat minim. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di Kalimantan Tengah tidak maksimal.

2. Ada beberapa hal yang dianggap OJK sebagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Kalimantan Tengah, seperti:

- a. Sumber daya manusia berkualitas yang terbatas. Baik dari sisi OJK maupun dari masyarakat.
- b. Luasnya cakupan wilayah dan kondisi geografis Kalimantan Tengah
- c. Minat masyarakat yang kurang terkait lembaga keuangan
- d. Keterlibatan pemerintah daerah yang terbilang kurang dalam upaya peningkatan literasi keuangan seperti Bank Pembangunan Daerah Kalteng masih berbasis konvensional dan tidak memiliki unit syariah.

Namun peneliti tidak melihat hal yang demikian itu sebagai kendala karena ada banyak solusi yang tersedia bagi OJK untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut seperti:

- a. Meningkatkan kerja sama dengan instansi atau kelompok organisasi lain seperti IAIN Palangka Raya dan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah).
- b. OJK harus mampu memaksimalkan media dan kemudahan teknologi yang tersedia sehingga mampu menjangkau masyarakat meskipun dengan cakupan wilayah yang luas.
- c. OJK harus mampu menciptakan ruang edukasi yang menarik seperti bekerja sama dengan *influencer* atau menitipkan pesan edukasi kepada mereka untuk menarik minat masyarakat terkait literasi keuangan syariah.

- d. OJK harus lebih mandiri dalam mengedukasi masyarakat salah satunya dengan menciptakan program kerja khusus dalam rangka edukasi terkait literasi keuangan syariah.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di OJK Kalimantan Tengah tentang Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Peneliti memiliki beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar ke depannya proses edukasi terhadap masyarakat lebih dapat diterima baik oleh semua lapisan masyarakat.

1. Secara keseluruhan program edukasi yang dilakukan oleh OJK Kalteng sudah baik. Namun menurut pengamatan peneliti, pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan lagi dari mulai program edukasi dan daerah jangkauan serta masyarakat sasaran edukasi sehingga pemahaman akan tingkat literasi keuangan syariah dapat menyeluruh dan merata di segala aspek, karena wilayah kerja OJK Kalteng sangat luas. Beberapa hal yang menjadi masukan dari penulis antara lain: Mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas edukasi konsumen terhadap masyarakat dan peningkatan pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan.
2. Dibentuknya program khusus dari OJK dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah sehingga pengetahuan masyarakat terkait keuangan syariah menjadi lebih baik dan terwujud masyarakat yang *well literate*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zaenal, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Edisi Revisi, Purwokerto: STAIN Perss, 2014.
- Alwi, Hasan, dkk.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rienka Cipta, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*, Cet I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Daim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Fahmi, Irham, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Alfabeta, 2014.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research: Untuk Peneliti Laporan Skripsi, Tesis dan Disertasi jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2012.
- J, Edward Blocher, *Manajemen Biaya Penekanan Strategis*, Terjemahan M. Y. Hamdan dan M. R. Adhi, Buku 2, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta :OJK, 2016.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 1995.
- S, Kusumaningtuti. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, Malang : Empat Dua, 2016.
- Sutedi ,Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa sukses, 2014.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Cet I, Jakarta : Raja Grafindo Prasada, 2016.
- Wahid, Nusron, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta:Gramedia, 2014.
- Wahid, Nusron, *Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Wiratna, V. Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

B. Jurnal dan Skripsi

- Abdullah, Rose dan Ahmad Lutfi Abdul Razak, *Exploratory Research Into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam*, 2015.
- Erika, Vira, *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU*, skripsi, Medan: 2019.
- Gusta, Adib, *Literasi Keuangan Pada UMKM di Pasar Koga Bandar Lampung*, Bandar Lampung, 2016.
- Hidayat, Amin, *Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto)*, Skripsi Sarjana, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Ismiyanti, Nina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Palangka Raya*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019. h.141.
- Isnurhadi, *Kajian tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah: Studi kasus masyarakat kota Palembang*, Laporan Hasil Penelitian, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013.
- Kurniawan, Budi, *Teori Kendala Sebagai Alat Pengukur Kinerja*, Jurnal Akuntansi Bisnis Vol. 9 No. 2, Universitas Bunda Mulia, h. 216

- Larasati, Selviana Putri, Setya Haksama, *Penerapan Theory of Constraint Pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya*, Surabaya: Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 4 Nomor 2, 2016.
- M, Purnomo Antara, dkk, *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem*, Procedia Economics and Finance, 2016.
- R, Delyana. Pulungan, *Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Kota Medan*, 2017.
- Salehudin, Imam, *Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation*, SSRN Electronic Journal, 2010.
- TIM Kerja Sama Pantia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum: Kajian Akademik*.
- Widayati, Irin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Jurnal Asset: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, 2012.
- Yulianto, Agus, *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Produk atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: skripsi, 2018.

C. Internet

- <https://jdih.setneg.go.id/>, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- <https://kalteng.bps.go.id/statictable/2017/11/01/592/jumlah-pemeluk-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-2016.html>.
- <https://pressrelease.kontan.co.id/release/tingkatkan-literasi-keuangan-pelajar-bni-syariah-gelar-direksi-mengajar-di-palangka-raya?page=all>,
- <https://sampit.prokal.co/read/news/19641-ojk-siap-dampingi-desa-kemungkinan-lkm>
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Resmikan-Kantor-Baru-di-Palangkaraya.aspx>.
- <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/03/15/o42ets383-indonesia-urutan-ketiga-dunia-yang-tidak-melek-keuangan>, *Indonesia Urutan Ketiga Dunia yang Tidak Melek Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat* dalam <http://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi*

Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017)* dalam www.ojk.go.id,

